

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Dasar dan Landasan Hukum Kerukunan Umat Beragama

Tidak bisa dibantah bahwa beberapa tahun belakangan ini, kekacauan hubungan antar dan intern umat beragama dipicu bangkitnya fanatisme keagamaan telah menghasilkan berbagai konflik di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Perlu orang-orang yang menunjukkan diri sebagai manusia beriman dan beragama dengan taat, namun disisi lain berwawasan terbuka, toleran, rukun dengan mereka yang berbeda agama.

Jauh sebelum Indonesia merdeka para *founding fathers* telah sepakat bahwa heterogenya komponen negeri dari berbagai aspek harus menjadi kekuatan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Oleh sebab itu secara konstitusional kerukunan umat beragama telah dilegitimasi oleh pemerintah menjadi sebuah acuan dalam berinteraksi. Dapat kita lihat beberapa dasar dan landasan berikut ini :

a. Filsafat pancasila

Landasan filsafat ini merupakan pokok filsafat negara, dasar dari kedua pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia merupakan dasar yang harus dijaga agar jangan sampai ada yang merusak dasar filsafat ini.

Kiranya menjadi kewajiban bagi semua komponen bangsa sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan amanah pancasila ini, maka bersikap dan bertindak menuju pada kerukunan hidup beragama adalah sebuah kemuliaan¹.

b. Undang-Undang Dasar 1945

Pada UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Ini merupakan landasan untuk hidup rukun tanpa adanya paksaan dan intervensi baik secara halus maupun kasar untuk memeluk atau menganut atau meninggalkan agama tertentu².

Membahas mengenai kehidupan beragama dalam perspektif konstitusi dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib untuk memeluk dan menjalankan agama. Hal ini menjadi suatu konsekuensi bagi pemeluk agama yang bersangkutan wajib menjalankan syariat agama. Apabila seseorang telah memeluk satu agama atau menyatakan diri telah memeluk agama, maka dia harus tunduk pada aturan agama tersebut, bukan justru dia hanya mengaku beragama saja tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang umat dengan sungguh-sungguh. Pengertian hak beragama hanya mengenai hak untuk menjalankan salah satu agama yang berlaku di

¹ H.Alamsyah Ratu Perwira Negara, *Kehidupan Beragama Dalam Negara Pancasila*, (Jakarta : Depag RI, 1982), hlm. 50.

² *Ibid*, 51.

Indonesia. Sehingga dalam tataran implementasi mengenai kehidupan beragama perlu adanya aktualisasi mengenai nilai-nilai kebebasan yang ada untuk memberikan pencerahan makna yang terkandung di dalam UUD 1945.

Penekanan kewajiban untuk menjalankan agama yang dibuktikan dengan menjalankan rukun-rukun dari setiap aturan agama yang berlaku di Indonesia sehingga apabila prinsip beragama dalam perspektif konstitusi diartikan secara seimbang antara hak dan kewajiban, maka akan mudah bisa mewujudkan ketertiban hukum, kehidupan yang saling toleransi dan ketentraman.

c. Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Ditegaskan pula dalam GBHN pola umum pelita III, bahwa atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Kerukunan hidup yang semakin baik diantara sesama umat beragama, berarti secara tidak langsung ikut serta mewujudkan tercapainya stabilitas keamanan nasional yang sehat dan dinamis serta merupakan salah satu dari trilogi pembangunan.

Kerukunan hidup beragama merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta

stabilitas keamanan nasional bagi kelancaran dan suksesnya pembangunan nasional disegala bidang³.

- d. Rukun, saling menghormati, saling menghargai adalah kepribadian bangsa

Telah menjadi pribadi bangsa Indonesia yang terkenal sejak dahulu oleh negeri-negeri lain bahwa manusia Indonesia berkarakter rukun, saling menghormati satu sama lain, gotong royong dalam pembangunan dan lain sebagainya. Semuanya itu digali dan dihasilkan dari nilai kehidupan sehari-hari mayoritas masyarakat. Ke depan hendaknya dasar-dasar ini terus dikembangkan dan diinternalisasikan kepada generasi bangsa.

- e. Tugas Nasional Bersama Dalam Pembangunan

Pembangunan bangsa dan negara adalah tugas nasional, oleh karenanya seluruh individu dan golongan harus ikut berperan menyukseskannya. Rakyat yang selalu bersinggungan dengan berbagai macam konflik disebabkan oleh masalah ideologi masing-masing tidak sempat berbuat sesuatu untuk membangun bangsa dan negara bahkan bisa menggagalkan program pemerintah dalam pembangunan. Kehati-hatian dalam melakukan sesuatu merupakan kunci dasar untuk memahami fenomena yang terjadi.

Setiap orang pada umumnya yakin bahwa apa yang dianutnya paling benar tetapi hal itu tidak menghalangi untuk mengakui kenyataan bahwa disamping persamaan ada juga

³ Depag RI, *Peraturan Perundangan yang Menyangkut Tata Kehidupan Bersama dan Pendirian Rumah Ibadah*, (Jakarta: P3K, 1983-1984), hlm. 83-84.

perbedaan yang terdapat diantara agama sehingga akan timbul hormat menghormati antar pemeluk agama⁴.

2. Konstruksi Inklusivisme Generasi Muda Agama

Pada setiap zaman di manapun, pemuda adalah segmen masyarakat yang senantiasa diunggulkan. Peran dan kiprahnya tidak saja mengisi sejarah kehidupan suatu masyarakat, namun juga menggerakkannya. Tidak berlebihan jika sejarah Islam, misalnya, menyebut beberapa kisah heroik dan inspiratif tokoh-tokoh muda di zamannya, yang mewarnai kegemilangan Islam saat itu. Bahkan Al-Quran menceritakan bagaimana kegigihan pemuda bernama Ibrahim dalam menjaga akidah. Demikian halnya sekelompok pemuda Ashabul Kahfi yang dengan berani berjuang dan berkorban dalam mempertahankan keyakinan dari tirani kekufuran. Sungguh kisah-kisah yang telah menginspirasi pemuda-pemuda setelahnya.

Begitupun kaum muda Indonesia, baik mahasiswa maupun bukan dalam sejarah kehidupan politik bangsa Indonesia memiliki tempat tersendiri sebagai salah satu komponen strategis yang senantiasa tampil di depan. Hal ini tentu saja bukanlah merupakan keunikan yang terjadi di negeri kita saja melainkan fenomena sosiologis dan politis yang terjadi di banyak negara. Hal ini disebabkan oleh paling tidak adanya semacam kepercayaan bahwa kelompok sosial yang satu ini memang telah mempunyai bawaan tertentu yang membuat mereka selalu berada pada posisi terdepan dalam proses perubahan politik.

⁴ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1979), hlm. 358.

Di zaman modern ini, misalnya, telah bermunculan para pejuang-mujahid muda di medan-medan perjuangan fisik. Demikian juga telah bermunculan pemuda-pemuda penemu dan pengembang ilmu pengetahuan yang telah mewarnai dunia. Tidak hanya di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), di ranah ilmu sosial pun telah tumbuh para perekayasa perubahan sosial yang kebanyakan dari kalangan muda (*social agent*).

Dalam konteks Indonesia kedepan maka penyikapan kaum muda terhadap pluralitas merupakan persoalan serius untuk menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Sebab bagaimanapun identitas bangsa terbangun dari puluhan bahkan mungkin mencapai ratusan suku, tradisi dan adat istiadat serta berbagai ras, agama dan aliran kepercayaan yang bermacam-macam.

Prinsip pluralisme sebagai paham yang menghargai eksistensi perbedaan diantara umat manusia diakui dan dilestarikan dalam bentuk semboyan negara yakni bhineka tunggal ika, mesti diyakini sebagai khazanah nasional dan menjadi ruh dari setiap gerakan-gerakan kaum muda. Dengan kata lain, semangat untuk saling menghargai perbedaan antar setiap komponen bangsa merupakan prinsip yang sudah final dalam merumuskan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya selama seseorang masih terikat kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara, selama itu pula ia berhak dan harus diperlakukan sama dan setara dengan warga negara lainnya. Tanpa melihat dari mana asal ras, suku, dan kelompok mayoritas atau minoritas.

Berdasarkan pemaparan diatas menurut Muhammad Syibli Sihabuddin⁵ paling tidak ada dua hal yang dapat dijadikan platform pergerakan yang mengiringi visi politik kaum muda kedepan.

Pertama, melakukan perekatan identitas kebangsaan. Sadar atau tidak, konflik yang acapkali terjadi disebabkan oleh timbulnya benturan keyakinan antar komunitas masyarakat. Dan benturan itu akan lebih tampak dipermukaan ketika keyakinan yang dimiliki diekspresikan secara eksklusif dan berusaha mentransformasikannya secara monopolitik. Oleh karena itu, kehormatan dari eksistensi suatu komunitas masyarakat hanya dapat dijaga lewat cara-cara atau gerakan-gerakan yang bisa diterima oleh kelompok lain, bukan ditegakkan dengan sebuah penindasan atau peningkatan terhadap komunitas masyarakat lain. Untuk itulah dengan upaya perekatan identitas bersama sebagai sebuah bangsa, merupakan kontribusi kaum muda dalam menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.

Kedua, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak dapat disangkal bahwa penampilan kaum muda yang akomodatif secara tidak langsung akan berdampak positif bagi upaya penegakan nilai-nilai kemanusiaan dibanding kekakuan sikap dalam beragama yang dapat mereduksi hak-hak asasi masyarakat karena cenderung berpihak pada eksklusivisme yang berpotensi memonopoli kebenaran serta mudah menyulut kekerasan berlatar agama. Sikap akomodatif ini merupakan kedewasaan dan kearifan kaum muda sebagai wujud dari totalitas

⁵ M. Zainuddin Daulay, *Mereduksi Eskalasi Konflik Antarumat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, 2001), hlm.40.

penghargaan terhadap pluralitas yang justru diyakini mampu menjadi rahmat bagi semua orang.

Pada akhirnya sikap akomodatif kaum muda yang lahir dari adanya kesadaran untuk menghargai perbedaan atau keanekaragaman budaya merupakan landasan yang kokoh bagi pola pikir, sikap dan perilaku yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian orang tidak harus diperlakukan secara manusiawi hanya lantaran ia beragama Islam misalnya, tetapi lebih didasari oleh pemahaman bahwa nilai kemanusiaan memang menjadi milik setiap orang.

3. Komunikasi Dialogis Sebagai Kontrol Sosial

Kemajemukan agama yang ada di Indonesia merupakan kenyataan historis dan empiris yang tidak dapat dibantah lagi. Pluralitas tersebut menghadirkan potensi konflik sosial diantara pemeluknya. Sejarah telah mencatat tentang sering munculnya konflik tersebut, baik dalam level intern atau antar pemeluk agama. Konflik yang terjadi pada masyarakat pluralis tidak dapat dihilangkan, karena beranggapan saja bahwa dalam masyarakat pluralis tidak akan terjadi konflik, apalagi berusaha untuk menghilangkannya adalah sama artinya menafikan karakter masyarakat modern.

Konflik hanya dapat dikendalikan agar menjadi potensi positif bagi pengembangan kehidupan masyarakat. Salah satu model untuk mengendalikan konflik antar umat beragama adalah melalui pembentukan jaringan komunikasi sosial dan kerjasama lintas agama.

Keberagaman merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada kitab suci. Konsep relegiusitas dalam tulisan ini mengikuti analisis *relegion commitment* dari Glock dan Stark⁶, keberagaman muncul dalam lima dimensi yaitu ideologis, intelektual, ekperimensial, ritualistik dan konsekuensial. Dua dimensi yang pertama adalah aspek kognitif keberagaman dan yang ketiga adalah aspek afektif keberagaman.

Lima dimensi keberagaman tersebut diasumsikan sebagai potensi yang dapat mengembangkan kualitas kerukunan dan keserasian sosial dalam kehidupan umat beragama. Karenanya, lima aspek keberagaman tersebut akan dikaji dan dianalisis dalam pendekatan empiris-historis-kritis agar dapat memberi kontribusi untuk mengurangi kadar dan intensitas ketegangan antar umat beragama⁷.

Dalam lima belas tahun terakhir ini, kajian tentang konflik dan manajemen konflik atau resolusinya berkembang pesat di belahan dunia. Kajian tersebut memberikan definisi konflik secara variatif. Bahkan tiap penelitian membangun konsepsi pendekatan yang berbeda dan tidak selaras dengan teori yang lain. Hal seperti mudah dipahami karena memang konflik dalam masyarakat pada umumnya mempunyai karakter dan multifaced disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait dan saling bersentuhan antar satu dengan lainnya.

⁶ Rolan Robertson, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis* (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm. 295-296.

⁷ HM.Amin Abdullah, *Relevansi Studi Agama di Era Pluralisme Agama*, dalam Muhammad Sabri, *Keberagaman Yang Saling Menyapa, Perspektif Filsafat Perennial* (Yogyakarta :Ittaqa Press, 1999), hlm.xiv.

Sebuah analisis dari Charles Watskins, sebagaimana dikutip oleh Robby L. Chandra⁸ agaknya membantu kita memahami konsep konflik. Menurut Watkins konflik terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan operasional dapat saling menghambat. Disamping itu, konflik dapat terjadi bila suatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak namun hanya salah satu pihak yang mungkin mencapainya.

Dalam perspektif ilmu sosial, transformasi sosial selalu membawa konflik dalam masyarakat. Konflik sosial dalam bentuk apapun merupakan fenomena yang tidak dapat terelakkan, terlebih dalam masyarakat pluralis. Pandangan yang mengatakan bahwa konflik harus dihilangkan sama artinya tidak mengakui karakteristik masyarakat pluralis. Konflik sulit dihindari, tetapi harus dikelola dan dikendalikan sebagai kekuatan sosial dalam rangka mencapai kualitas hidup sosial yang lebih baik.

Fenomena terjadinya konflik sosial merupakan indikasi bahwa ada kemacetan komunikasi antar berbagai golongan dalam masyarakat yang pluralis⁹. Karena komunikasi merupakan bagian dari proses budaya, maka komunikasi dengan berbagai kiat dan pendekatannya bisa dipercaya meredakan atau sekurang-kurangnya mengantisipasi datangnya konflik.

Komunikasi sebagai suatu alat yang dapat menjembatani konflik sosial yang terjadi. Newcomb¹⁰ menjelaskan dapat diharapkan bahwa kelompok-kelompok yang anggotanya telah saling berkomunikasi secara

⁸ Robby L Chandra, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hlm.19.

⁹ Satoso S. Hamijoyo, "Konflik Sosial Dengan Tindak Kekerasan Dan Peranan Komunikasi", *Mediator Jurnal Komunikasi*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2001, hlm.26.

¹⁰ Newcomb, *Psikologi Sosial* (Bandung : Diponegoro, 1985), hlm. 290.

terus menerus akan menampilkan ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kelompok yang baru terbentuk. Oleh sebab itu perilaku komunikatif seseorang sebagian besar terbentuk oleh pandangan dan persepsi orang tersebut saat berhubungan dengan orang lain¹¹.

Komunikasi merupakan proses penciptaan kebersamaan dalam makna. Intinya adalah titik temu, modalitasnya adalah musyawarah, dialog, negosiasi, tujuannya adalah mencapai kesepakatan untuk mendekatkan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan. Model jaringan komunikasi sosial yang ditawarkan untuk pengembangan kerukunan dan pengendalian konflik antar umat beragama pada dasarnya mengikuti model *Development Support Communication* (DSC) sebagai kebalikan dari *Development Communication* (DC)¹². Konsep DSC ini dikembangkan dari pola komunikasi konvergen dan sirkular, yang berlandaskan konsepsi komunikasi sosial sebagai proses dialog dua arah dalam upaya mencapai saling pengertian dan kesepakatan antara dua individu atau dua kelompok atau lebih dan bukan satu orang atau satu kelompok yang berkuasa memaksakan kekuasaannya kepada yang lain¹³.

Dalam pola komunikasi konvergen dan sirkuler, sumber dan arus komunikasi tidak tergantung pada komunikator tunggal, tetapi siapapun diusahakan dan diberi kesempatan untuk menjadi objek dan subjek komunikasi. Konkritnya, komunikator tidak perlu dimonopoli oleh para

¹¹ Alo Leliweri, *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 210.

¹² Andre Harjana, "Perbandingan Pola Strategi Komunikasi Penunjang Proses Industrialisasi", *Jurnal ISKI*, Oktober 1993, hlm. 36.

¹³ Santoso S. Hamiwijoyo, "Landasan Ilmiah Komunikasi: Sebuah Pengantar", dalam *Mediator Jurnal Komunikasi*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2000, hlm. 5.

birokrat, penguasa yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan melainkan siapapun saja yang peduli dan kompeten serta berdedikasi dan kredibel perlu diberi akses komunikasi dan kesempatan menjadi komunikator.

Dalam pola komunikasi konvergen dan sirkular banyak pemeran yang memerlukan koordinasi yang baik. Maksud koordinasi disini bukan sentralisasi dengan ada satu instansi pemerintah atau kelompok resmi yang menjadi fokus sentral. Koordinasi dimaksudkan adalah interaksi yang mengarah pada kerjasama sebagai tim antara berbagai pemeran komunikasi atas dorongan masyarakat (*community driven*). Pendekatan koordinasi bukan administratif, birokratik melainkan sosio kultural. Hal ini dilakukan dimana saja.

Pada satu kota besar misalnya, bisa ada beberapa pengelompokan pemeran komunikasi. Di level kecamatan boleh ada kelompok koordinasi dan ia tidak perlu melapor pada kelompok koordinasi ditingkatan kabupaten. Tiap-tiap kelompok koordinasi melapor pada publik di wilayah jangkauannya masing-masing. Ini semua untuk menjamin interaksi dialogis demi kreativitas, kompetisi sehat, partisipasi dan demokrasi sampai masyarakat di akar bawah (*grassroot community*).

Kerangka pikir dan operasional dalam *Development Support Communication* berbasis pada pola komunikasi konvergen dan sirkular seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dijadikan interaksi, kerjasama, sinergi, menarik pelajaran dan mengonsolidasikan pengalaman yang sangat berguna bagi pengembangan kerukunan dan pengendalian konflik antar umat beragama. Konsep jaringan komunikasi sosial yang

dikembangkan ini sebetulnya bauran dari tiga model resolusi konflik yang dikembangkan oleh Galtung¹⁴ yaitu peace keeping, peace building dan peace making.

Model Peace Keeping adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Peace Building lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas sedangkan peace making adalah upaya negosiasi antar kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan.

Dengan demikian kecenderungan konflik yang diakibatkan oleh pluralisme itu sesungguhnya dapat dikelola sehingga menjadi kekuatan perekat kehidupan sosial yang berlandaskan kebersamaan dalam keberagaman melalui komunikasi yang berlangsung dalam kesungguhan (*committed communication*) sebab pluralisme dan komunikasi yang dihadapi sedang dialog, sebagai inti komunikasi merupakan sikap untuk menanggapinya.

Komunikasi dialogis dan kerjasama adalah dua hal yang sambung menyambung. Yang satu mengandaikan yang lain. Tidak ada kerjasama tanpa didahului suatu dialog. Dialog yang tidak berlanjut pada kerjasama merupakan dialog setengah hati dan verbalisme. Jadi kerjasama lintas agama merupakan kesinambungan dari komunikasi dialogis antar umat beragama. Konsep kerjasama lintas agama dipahami sebagai aksi umat antar

¹⁴ Tubagus Erif Faturrahman, “*Negara Multi Etnis dan Resolusi Konflik*”, dalam Abdul Rozak dkk., Pendidikan Warga Kewargaan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani., hlm. 35.

iman dan agama bersama-sama menstranformasikan masyarakat agar menjadi lebih adil, lebih merdeka, dan manusiawi¹⁵.

Kerjasama lintas agama mengasumsikan bahwa pencerahan dan transformasi pada tataran pribadi-pribadi para pendialog dianggap tidak cukup. Mereka harus melakukan upaya transformasi sosial secara bersama-sama lintas agama.

Kerjasama lintas agama diarahkan pada persoalan-persoalan yang menjadi concern bersama umat beragama yaitu pada tingkatan etis, sosial, politis dan ekonomis¹⁶. Melalui penciptaan jaringan komunikasi sosial dan kerjasama lintas agama, sekurang-kurangnya konflik antar umat beragama yang terjadi pada arena medan konflik, dapat dikendalikan menjadi potensi positif dalam mengembangkan kerukunan dan keserasian sosial.

4. Dimensi Kerukunan Dalam Agama-Agama

Pada hakekatnya semua agama mengajarkan tentang hidup rukun di antara umat manusia. Terjadinya ketidak rukunan dalam masyarakat bukan karena ajaran agamanya, tetapi oleh penganutnya yang kurang memahami ajaran agamanya atau ada *untire-interes* tertentu.

Dibawah ini akan kita sampaikan pokok-pokok ajaran agama mengenai kerukunan.

- a. Dalam agama Islam diajarkan toleransi terhadap agama lain, seperti dimuat dalam surat Al Kafirun Ayat 6 “ bagimu agama kamu, dan bagiku agamaku”.

¹⁵ B.J. Banawiratma, “*Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain*”, dalam Eka Darmaputra, *Dialog : Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta : Dian/Interfidei, 1993), hlm.26-27.

¹⁶ Azyumardi Azra, *Bingkai Teologi Kerukunan: Perspektif Islam Dalam Konteks Berdialog Di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1991), hlm. 42.

Dalam tataran historis, Nabi Muhammad SAW pernah memberi tauladan yang dapat memberi inspirasi dihadapan para pengikutnya. Sejarah mencatat, Nabi pernah dikucilkan bahkan diusir dari tanah tumpah darahnya (Makkah). Beliau terpaksa hijrah ke Madinah untuk beberapa lama dan kemudian kembali lagi ke Makkah. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan Fathu Makkah. Dalam peristiwa yang penuh kemenangan ini, Nabi tidak mengambil langkah balas dendam kepada siapapun juga yang telah mengusirnya dahulu dari tanah kelahirannya. *antum ulaqaa* (kamu sekalian bebas), begitu ucapan Nabi terhadap mereka.

Peristiwa ini sangat memberi wawasan dan kesan yang sangat mendalam terhadap penganut agama Islam dimanapun mereka berada, Nabi telah memberi contoh konkrit, sekaligus contoh pemahaman dan penghayatan pluralisme keagamaan yang amat riil di hadapan umatnya.

Pada bagian lain Al-Qur'an mengajak kepada seluruh penganut-penganut agama lain dan penganut agama Islam sendiri untuk mencari "titik temu" (*kalimatun sawa*) di luar aspek teologis yang memang sudah berbeda semula (lihat Surah Ali Imran : 64). Pencarian titik temu lewat perjumpaan dan dialog yang konstruktif berkesinambungan merupakan tugas kemanusiaan yang abadi. Pencarian titik temu antar umat beragama dapat dimungkinkan lewat berbagai cara, salah satunya lewat etika, karena lewat pintu etika manusia beragama secara universal menemui tantangan-tantangan kemanusiaan yang sama.

b. Agama (Kristen) Protestan

Dalam ajaran agama (Kristen) Protestan, hidup rukun dengan semua orang, baik yang seiman maupun yang bukan seiman merupakan bagian dari kasih sayang yang diamanatkan Yesus Kristus kepada umat Kristen. Yakni sebagai ungkapan syukur atas kasih dan keselamatan yang di anugerahkannya (II Petrus 3 : 14; Kolose 1 : 7 ; 3: 15 -17). Pada bagian lain ajaran kristen ternyata ada banyak ajaran yang penuh dengan nuansa pembangunan moral, etika dan akhlak berbangsa. Misalnya Matius 22:39 mengajarkan bahwa kasih itu bukan hanya pada diri sendiri melainkan kepada sesama manusia. Selain itu diajarkan pula cara bergaul dengan setiap orang dengan lemah lembut dan hormat. (ajaran ini terdapat dalam 1 Petrus 3 : 15, 16).

c. Agama Katolik

Penganut Katolik juga mempunyai dasar keyakinan bahwa semua bangsa yang hidup di dunia ini berasal dari satu Bapak. Oleh karena itu, orang Katolik merasa harus menghadapi setiap kelompok di luar mereka dengan penuh kasih dan menghargai mereka sebagaimana apa adanya. Hal ini sesuai dengan sikap Yesus ketika ia berdo'a untuk semua orang. Dalam do'anya Yesus mengatakan : “Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdo'a tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka;” (Yohanes 17:20-22).

Soal mengapa semua bangsa dan semua umat beragama harus bersatu dan hidup rukun, Paulus dalam suratnya kepada jemaan Galatia memberi jawaban yang sangat tepat. Yaitu, semua bersatu dan hidup rukun

bukan semata-mata karena perintah hukum Taurat atau perintah Kitab suci maupun, melainkan karena kenyataan bahwa kita semua telah tersatukan dalam iman. Bagi orang Katolik ia harus bersatu dan hidup rukun dengan orang lain justru karena kepada Allah dalam diri Yesus Kristus itu.

d. Agama Hindu

Bagi penganut Hindu, ajaran Atmanastuti adalah salah satu pilar ajaran yang melahirkan sikap rukun. Ajaran ini mengajarkan penyelesaian beda pendapat melalui jalan musyawarah. Selain itu terkenal pula ajaran tentang kerukunan yang disebut dengan tattawam asi. Tata artinya itu (ia atau saya), tawam yang artinya kamu, asi yang artinya adalah. Jadi Tattawam Asi berarti saya adalah kamu dan segala makhluk adalah sama, berasal dari satu sumber yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran demikian menunjukkan implikasi moral, etik dan akhlak berbangsa bagi umat Hindu. Ajaran ini diinterprestasikan antara lain dengan pemahaman bahwa menolong orang lain berarti menolong diri sendiri dan menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri. Sikap ini sesuai dengan ajaran kitab suci Hindu Y. 36-17.

e. Agama Budha

Doktrin agama budha juga sarat dengan ajaran kerukunan yang berguna bagi peningkatan moral, etika dan akhlak berbangsa. Salah satu dari ajaran kerukunan itu ialah ajaran Brahma Vihara (Catur Paramita menurut kitab Sanghyang Kamahayanikan), yakni terdiri dari empat sifat mulia yaitu : Metta atau Maitri, suatu sifat cinta kasih yang universal; cinta kasih bagi semua makhluk, tanpa pamrih tanpa mementingkan diri sendiri.

Karena, sifat kasih sayang tidak terbatas. Mudita, perasaan simpati terhadap kebahagiaan dan kegembiraan orang lain. Upekka, yakni bathin yang seimbang, selaran dan serasi, bebas dari kekerasan dan kegelisahan bathin.

Berdasarkan doktrin tersebut dari masing-masing agama diatas maka makin jelas bahwa ajaran agama ternyata sangat mengunggah umatnya untuk senantiasa menggalang kerjasama menghadapi tantangan hidup guna membangun kehidupan bersama yang lebih baik.

Untuk era sekarang, tantangan iptek dengan segala implikasinya tantangan lingkungan hidup, menjunjung tinggi harkat kemanusiaan (*human dignity*), menghormati hak asasi manusia adalah merupakan agenda bersama umat manusia tanpa pandang “bulu” keagamaannya.

Adalah tugas mulia beragama secara bersama-sama untuk menginterpretasikan ulang ajaran-ajaran agamanya untuk dikomunikasikan pada wilayah agama lain, sehingga mengurangi ketegangan antar umat beragama¹⁷.

5. Internalisasi Spirit Teologi Transformatif

Sejauh rekaman konflik keagamaan di Indonesia dilacak, akan terlihat tiga pola besar yakni konflik umat beragama yang berbeda, konflik antara satu umat seagama dengan kelompok yang dianggap sesat, dan konflik intern umat satu agama yang memiliki pemahaman berbeda. Pola pertama terlihat sangat jelas dalam berbagai kasus pelarangan pembangunan rumah ibadah. Kasus kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah adalah

¹⁷ Mustofa, *Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia*”, dalam Mursyid Ali, *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-Agama* (Jakarta: Departemen Agama), hlm.151-154.

contoh untuk pola kedua, sedang bentrokan Sunni – Syiah mempresentasikan pola konflik ketiga. Dilihat dari sudut manapun, kondisi tersebut tentu sangat merugikan umat manusia secara umum dan negara Indonesia khususnya.

Berbagai laporan yang dirilis beberapa lembaga menunjukkan tingginya angka kekerasan agama di Indonesia pasca reformasi. Laporan Moderate Muslim Society tahun 2010 mencatat adanya 81 kasus kekerasan agama. laporan ini tentu saja bukan gambaran sempurna karena tidak semua wilayah Indonesia masuk dalam jangkauan monitoring¹⁸. Bahkan pada wilayah yang rentan konflik tidak semua kasus kekerasan agama dilaporkan. Misalnya dalam laporan Moderate Muslim Society kasus kekerasan agama di Jawa Timur hanya 4 kasus padahal menurut laporan yang dikeluarkan oleh Center For Marginalized Communitied tahun 2010 tercatat 56 kasus yang bisa masuk kategori pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan¹⁹.

Secara garis besar gambaran kehidupan beragama tahun 2011 yang muncul di laporan paling mutakhir Center for Relegios and Cross-Cultural Studies atau CRCS UGM tak berbeda secara signifikan dari beberapa tahun sebelumnya. Hal itu tidak berarti berita baik, tetapi mengisyaratkan bahwa

¹⁸ Laporan ini menjangkau DIY, Banten, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, Sumatera Barat, NTB, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Lihat Moderate Muslim Society, Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010 Ketika negara membiarkan Intoleransi. Lihat juga Zainal Abidin Bagir et al., Laporan Tahunan Kehidupan Umat Beragama di Indonesia 2010 (Yogyakarta : CRCS, 2010) Penyusun, Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi (Jakarta: the Wahid Institute, 2010)

¹⁹ Tim Center For Marginalized Communitied Studies, *Berdamai Dengan Kekerasan: Fakta Tindakan Intoleransi Dan Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Jawa Timur* (Yogyakarta : CRCS, 2010), hlm. 29.

dalam beberapa tahun ini belum ada kemajuan yang mengembirakan atau justru kemunduran dalam beberapa hal²⁰.

Ada beberapa hal utama yang digarisbawahi dalam laporan tersebut. Dari segi isu, dua yang utama dan kerap menjadi masalah masih tetap, yaitu penodaan/ penyimpangan agama dan rumah ibadah. Kedua hal ini menjadi isu utama karna dalam beberapa tahun ini konflik-konflik di sekitar itu kerap berubah menjadi kekerasan yang tak tertangani dengan baik.

Pandangan senada dapat kita lihat pula dari salah satu penilaian yang di ajukan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil. The Wahid Institute (WI), misalnya setiap tahun sejak 2008 menerbitkan laporan kebebasan beragama dan toleransi di indonesia (sebelumnya sejak 2005 telah menerbitkan bulanan). Sesuai namanya, laporan ini terutama membahas dua hal : (1) pelanggaran kebebasan beragama, yang pelakunya adalah institusi negara termasuk kantor kementerian, badan-badan negara, polisi, kantor pengadilan, tentara dan juga pemerintah daerah, desa, kecamatan, kabupaten atau kota dan provinsi; dan (2) intoleransi atas dasar agama dan keyakinan, yang pelakunya dapat negara tetapi juga kelompok masyarakat (ormas, individu, maupun massa yang teridentifikasi). Berdasarkan kedua kriteria itu , WI menghitung secara kuantitatif jumlah pelanggarn dan tindakan toleransi. Membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ,WI menilai kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2011 sudah sampai tahap lampu merah²¹.

²⁰ Zainal Abidin Bagir et al., *Laporan Tahunan Kehidupan Umat Beragama di Indonesia 2011* (Yogyakarta : CRCS, 2012), hlm. 31.

²¹ Tim Penyusun, *Lampu Merah Kebebasan Beragama: Laporan Kebebasan Beragama Dan Toleransi Di Indonesia 2011* (Jakarta: The Wahid Institut 2011), hlm. 23.

Sebenarnya melekatkan agama sebagai suatu varian potensial pemicu kekerasan adalah hal yang tidak mudah. Demikian ini agama sebagai ajaran yang selalu diasosiasikan dengan ajaran yang sarat dengan nilai kedamaian dan keselamatan. Sementara dalam suatu tindak kekerasan terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran bahkan kematian. Wajah sejuk agama sangat tidak mungkin dilekatkan dengan wajah yang panas kekerasan. Fakta seringkali menunjukkan bahwa agama dapat menunjukkan bahwa agama dapat memicu adanya tindak kekerasan. Pemeluk agama menjadi doktrin agama sebagai main drive, primum mobile dan push factor kekerasan yang mereka lakukan²².

Tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama sering kali di terjemahkan oleh sebagian orang sebagai legal doktrin yang harus di laksanakan. Kekerasan atas nama agama dapat di terjemahkan sebagai kekerasan yang melibatkan agama sebagai premium variant. Kekerasan adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan²³. Begitu sensitifnya persoalan agama bagi masyarakat indonesia, sehingga konflik sosial dan politik yang sebenarnya diluar agama pun seringkali ditarik ke wilayah agama untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemeluknya²⁴.

Konflik berlatar belakang agama kadang-kadang masih terjadi, termasuk di era reformasi, seperti konflik ambon, poso, sampit, ciketing,

²² Imam Prio Handoko, *:Upaya Menjadikan Dunia Menjadi Indah*, Kompas, Rabu 15 Februari 2006. hlm.15.

²³ I Marsana Windu, *Kekuatan Dan Kekerasan Menurut John Galtung* (Yogyakarta: Kanisius 1992), hlm.62.

²⁴ Slamet Effendi Yusuf, “ Review 5 Tahun Kehidupan Umat Beragama Di Indonesia : Perspektif MUI, “Makalah Disampaikan Dalam “Kongres FKUB” di Jakarta, 21-22 November 2011. hlm. 5.

yasmin, dan lain-lain. Konflik-konflik ini, sebenarnya tidak diawali oleh faktor agama, tetapi persoalan ekonomi, sosial dan hukum secara umum. Hanya saja, kemudian para pelakunya melibatkan agama untuk mendapatkan dukungan emosional dari kelompok agama. Dalam hal ini agama dimanfaatkan sebagai faktor pemersatu (integratif) bagi komunitas agama tertentu, tetapi menjadi faktor pemecah belah (disintegratif) antar kelompok beragama yang berbeda.

Dilihat dari sudut manapun, kondisi semacam itu tentu sangat merugikan umat manusia secara umum dan masyarakat serta negara secara khusus. Mereka terdampar dalam suatu kondisi yang sangat sulit untuk menyikapi persoalan secara arif dan sekaligus berada dalam inerti yang tidak tertolong untuk mencari solusi secara kreatif, sistematis dan tuntas²⁵.

Bagi Indonesia yang memiliki komposisi penduduk heterogen, pencarian resolusi konflik adalah kebutuhan mendesak yang harus segera dilaksanakan. Berbagai mekanisme penyelesaian konflik telah ditempuh guna menyelesaikan konflik bernuansa agama, ternyata telah memunculkan konflik-konflik baru yang tidak berkesudahan. Salah satu yang harus diajukan bagi muslim Indonesia adalah resolusi konflik yang lebih paradigmatik dan holistik berbasis teologi transformatif.

Di Indonesia corak pemikiran teologi transformatif diprakarsai oleh Musliem Abdurrahman. Pengertian tentang teologi transformatif dimaksudkan oleh Moeslim sebagai pencarian metode berpikir dan tindakan memihak serta yang mampu mempersenjatai masyarakat untuk bisa bangkit

²⁵ Abd A'la, "Konflik Kekerasan ; Antara Politisi Agama , Etnisitas Dan Politik Kekuasaan", *Para Media* Vol.8, no. 3, 200, hlm. 2.

dan keluar dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan dengan mengesampingkan paradigma modernisasi²⁶.

Munculnya teologi transformatif adalah sejarah baru bagi Indonesia, di mana dalam konteks keindonesiaan pada dasarnya antitesa dari Islam peradaban yang diprakarsai oleh Nurcholis Majid. Gerakan Islam peradaban yang selama ini lebih membentuk kekuatan Islam di kalangan menengah dan abai terhadap masalah-masalah di tingkat bawah, seperti kemiskinan, penindasan dan penghisapan.

Jika boleh dikatakan teologi transformatif adalah teologi kontekstual, sebuah teologi yang di pahami dan di dialogkan secara dialektis sesuai dengan konteks problematika umatnya dalam berhadapan dengan dinamika sosial. Ekonomi, budaya, maupun politik. Ini merupakan perkembangan teologi yang bersifat praksis, dimana kaum beriman melakukan sebuah tindakan yang tidak semata bersifat ukhrawi, tetapi juga bagaimana kaum beriman dengan teologinya membangun kedamaian, keadilan, egalitarianisme di dunia ini.

Dalam kerangka pemikiran teologi yang demikian gagasan teologi transformatif Moeslim Abdurrahman dielaborasi dan mendapat landasan acuan teoritis atas pengklasifikasian teologi Islam secara umum. Moeslim merumuskan enam dasar yang harus dimiliki teologi transformatif: pertama, teologi yang bertautan dengan visi sosial yang emansipatorik. Kedua, artikulasi pesan agama dan bukan itu sendiri dalam wujudnya yang wadah (pemahaman pasca-convensional ortodoksi agama). Ketiga, model ideal

²⁶ Moh. Shofan, *Jalan Ketika Pemikiran Islam : Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme Dan Liberalisme* (Jakarta : Paramadina IRCi SoD, 2006), hlm.45.

yang dirumuskan dari proses dialog antara super struktur dan realitas atau antara konteks dan teks. Keempat, basis ortodoksi bertumpu dan untuk kepentingan umat, jadi profesionalisme agama bertujuan sebagai pendampingan saja.

Kelima, berorientasi kepada praksis (ortopraksis dan bukan ortodoksi). Praksis agama berbeda dengan dakwah agama karena dakwah biasanya berorientasi kepada kepentingan membangun simbol-simbol permukaan, sedangkan praksis agama yang sejati seharusnya berorientasi kepada bagaimana menegakkan basis-basis nilai keberagamaan, yang lebih esensial. Keenam, berfungsi sebagai institusi kritis terhadap jebakan struktur yang melawan pesan dasar dari agama itu sendiri, termasuk struktur yang dibangun oleh proses sosiologi agama. Oleh karena itu pada dasarnya ijtihad merupakan mekanisme untuk meluruskan setiap bentuk penyimpangan (*bid'ah*) terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan dan bentuk-bentuk penghambatan selain kepada Allah (*musyrik*), sehingga keselamatan umat manusia secara umum dapat ditegakkan dan tidak terancam²⁷.

Menurut Abdul A'la,²⁸ nilai-nilai kemanusiaan universal yang terdapat pada agama akan tampak jelas ke permukaan dan akan berlabuh ke dalam kehidupan nyata manakala keberagamaan kita, khususnya umat Islam, merujuk secara kokoh kepada teologi transformatif. Teologi ini melihat aspek akidah sebagai bagian tak terpisahkan dari aspek akhlak yang kemudian harus diaktualisasikan ke dalam hukum yang harus ditaati dan

²⁷ Neneng Afwah, "Teologi Transformatif Upaya Membebaskan Kaum Tertindas (Study Atas Pemikiran Moeslim Abdurrahman)", *Antologi Kajian Islam*. Vol.15, no.1(2010).hlm.43.

²⁸ Abdul A'la, *Konflik Kekerasan*,....., hlm.3.

ditindak lanjuti dalam segala dimensi kehidupan yang kita jalani²⁹. Teologi transformatif berpijak pada ajaran dan nilai-nilai moralitas agama yang holistik yang pada gilirannya meniscayakan untuk ditransformasikan dan dikembangkan ke dalam praksis.

Teologi transformatif meniscayakan umat Islam untuk menghindari pemahaman agama secara parsial dan sepotong-potong. Demikian pula, teologi ini menuntut umatnya untuk melepaskan diri dari beban-beban sejarah keagamaan yang sering mendistorsi agama dari nilai dan perannya yang hakiki. Melalui pengembangan teologi ini, keberagaman manusia akan dilihat sebagai proses kreatif dan tanggung jawab untuk mengembangkan kehidupan yang selalu disandarkan pada nilai-nilai moralitas parental; keadilan, kesetaraan, hingga kedamaian dan kesejahteraan.

Pada satu sisi pula teologi transformatif mengandaikan adanya pembedaan yang tegas, tapi sekaligus berkelindan antara agama sebagai sesuatu absolut dan keberagaman yang bersifat relatif yang muncul dari keterbatasan manusia. Keberagaman harus dipahami sebagai usaha manusia untuk mendekati yang absolut, dan metahistoris yang sampai kapan pun nilai kebenarannya tidak mungkin menyamai kebenaran Tuhan. Karena itu keberagaman yang berpijak pada teologi transformatif selalu bersifat terbuka, dinamis, dan mengedepankan kerendahatian.

Dengan demikian, hal itu akan menghindarkan *one sided truth claim* yang angkuh, dan sekaligus dapat mengembangkan keimanan yang kokoh

²⁹ Fazlurrahman (ed),. “Prinsip Syura Dan Peranan Umat Islam” Dalam Mumtaz Ahmad masalah-Masalah Teori Politik Islam, terj. Erna hadi, cet. Ke 2 (Bandung : Penerbit Mizan 1994), hlm.15.

yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang civilized sebagai cerminan dari ajaran parental agama. pada gilirannya, hal itu akan menghindarkan penganut agama dari sikap dan tindakan serta konflik kekerasan dalam bentuknya yang langsung ataupun struktural terhadap penganut atau kelompok lain³⁰.

Dalam konteks inilah, teologi transformatif menemukan signifikansinya untuk menyelesaikan konflik atas nama agama. Namun semua itu sangat bergantung pada komitmen kita bersama untuk melakukan rekonstruksi. Terkait dengan hal itu, suatu pendidikan yang transformatif yang dapat mendewasakan manusia merupakan alfa-beta yang harus menjadi prioritas utama dalam semua upaya tersebut.

Sejalan dengan itu pula, semua lembaga atau organisasi sosial dan keagamaan serta institusi yang lain perlu dilibatkan untuk melakukan persemaian dan pengembangan teologi transformatif sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi garapannya. Mereka harus menjadi avant garde yang memelopori, sekaligus sebagai pusat jaringan yang menyebarkan arus transformasi ke segala arah. Dengan demikian semua wilayah yang ada disekitar kita akan menjadi ajang proses internalisasi dan sosialisasi keberagaman yang kondusif. Dampaknya, pola pandang, sikap dan perilaku kita nantinya diharapkan dapat mempresentasikan nilai-nilai moralitas luhur dan kreatifitas yang penuh kearifan dalam menyikapi kehidupan³¹.

³⁰ Abd A'la, Konflik Kekersan,....., hlm. 9.

³¹ *Ibid*, hlm.10.

6. Pemerintah dan Stabilitas Nasional

Untuk menciptakan suasana rukun di kalangan umat beragama, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberikan arahan sebagai berikut³²:

- a. Atas dasar keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- b. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kerukunan antar dan antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Bertolak dari penjabaran dalam pola dasar Repelita VI sektor Agama, maka kerukunan antar dan antara umat beragama yang dinamis lebih mantapkan dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal bersama-sama membangun masyarakat, antara lain melalui penyelenggaraan musyawarah intern dan antar pemuka beragama, musyawarah antara pemuka agama dengan Pemerintah, dan seminar cendekiawan antar agama.

³² Mustofa, *Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia*”, dalam Mursyid Ali, *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-Agama* (Jakarta: Departemen Agama), hlm.148-151.

Dalam membina kerukunan hidup umat beragama pemerintah mengambil beberapa kebijaksanaan antara lain sebagai berikut:

- a. Membimbing umat beragama agar makin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana rukun, baik intern maupun antar umat beragama.
- b. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama: islam, kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.
- c. Tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan syariat/ibadah sesuatu agama.
- d. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan.

Beberapa kasus yang muncul di berbagai daerah antara lain disebabkan oleh pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian peraturan untuk dijadikan acuan oleh semua pihak dalam menanggulangi kasus-kasus tersebut di atas.

a. Pendirian Rumah Ibadah

Pendirian rumah ibadah sampai sekarang ini dirasakan ada ganjalan. Di daerah-daerah Indonesia Timur yang umat Islamnya minoritas, umat Islam merasa mendapat kesulitan dalam mendirikan masjid dan mushalla. Di bagian-bagian lain yang umat Kristennya minoritas, umat Kristen juga merasa mendapat kesulitan dalam mendirikan gereja.

Karena sering timbul berbagai kasus tentang pendirian rumah ibadah tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan, yaitu SKB Menteri

Agama dan Menteri Dalam Negeri NO. 01/BER/mdn-mag/1969, tanggal 13 September 1969.

Dalam SKB tersebut antara lain dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat di bawahnya yang diberi kuasa untuk itu.
- 2) Izin Kepala Daerah/pejabat tersebut dikeluarkan setelah mempertimbangkan:
 - Pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat.
 - Planologi.
 - Kondisi dan keadaan setempat.
 - Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah/pejabat tersebut dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat.
- 3) Jika terjadi perselisihan Kepala Daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak

b. Penyiaran Agama

Dalam hal penyiaran agama masih dirasakan adanya “isu”, desas-desus kristenisasi dan islamisasi. Seperti kasus pendirian rumah ibadah, penyiaran agama juga masih dirasakan adanya ganjalan-ganjalan.

Di Irian Jaya yang mayoritasnya umat Kristen masih sering terdengar “isu” Islamisasi/jawanisasi, dan bagian-bagian lain yang mayoritasnya umat Islam juga masih sering terdengar “isu” kristenisasi.

³³ Tim FKUB Kota Surabaya, *Regulasi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. (Surabaya : Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya, 2013), hlm. 27-35.

Agar penyiaran agama dapat berlangsung dengan baik dan tidak mengganggu kerukunan, pemerintah telah mengatasi dengan mengeluarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979, tanggal 2 Januari 1979.

Dalam SKB tersebut antara lain dinyatakan bahwa³⁴:

- 1) Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya.
- 2) Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:
 - a) Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.
 - b) Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.
 - c) Melakukan kunjungan untuk menyiarkan agama dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

³⁴ *Ibid*, hlm. 107-103.

Dalam kenyataan terdapat beberapa peluang dan kendala dalam rangka pembinaan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia selama ini, antara lain sebagai berikut :

1) Peluang

Dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama terdapat beberapa peluang antara lain:

- a) Pada prinsipnya semua agama ingin menyejahterakan para pemeluknya, secara universal agama ingin menolong orang-orang miskin dan teraniaya. Persamaan pandangan tersebut memungkinkan berbagai penganut agama dapat bekerjasama untuk melakukan kegiatan / proyek-proyek dalam rangka penanggulangan kemiskinan, yang masih banyak terdapat di masyarakat kita.
- b) Agama-agama di Indonesia bersedia mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif, mau menerima dan menghargai kehadiran golongan agama-agama lain di luar dirinya.
- c) Hubungan keakraban dalam masyarakat Indonesia dapat meredam pertentangan antar agama yang berbeda.
- d) Dalam masyarakat secara tradisional ada kebiasaan-kebiasaan / adat istiadat yang sudah melembaga untuk memelihara ketertiban masyarakat walaupun berbeda agama seperti Mapalus di Minahasa, Rumah Betang di kalangan suku Dayak Kalimantan Tengah.
- e) Berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat didukung oleh semua pemuka

agama. Kegiatan-kegiatan seperti musyawarah dan dialog antar agama dapat berjalan dengan baik.

- f) Adanya dampak positif dari globalisasi informasi dan ekonomi, wawasan keberagaman masyarakat makin meningkat dan luas, juga adanya kemudahan bagi pemeluk agama untuk mendapatkan pengetahuan agama dari media informasi yang beragam.

2) Kendala

Di samping adanya sejumlah peluang, dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama terdapat juga sejumlah kendala yang dapat mengganggu terwujudnya kerukunan. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a) Di dalam agama-agama masih terdapat sekelompok orang yang berpandangan sempit, eksklusif dan menganggap pihak lain sebagai ancaman
- b) Di sana masih terdengar adanya keresahan masyarakat terhadap praktek-praktek pelaksanaan penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah
- c) Masih ada kesenjangan sosial diantara kelompok-kelompok agama atau golongan dan masyarakat. Dalam masyarakat yang demikian sangat mudah timbul salah faham yang dapat mengakibatkan keresahan sosial yang dipicu isu agama. Yang sangat membahayakan adalah adanya akumulasi kebencian tersembunyi dalam masyarakat karena kesenjangan sosial dan ekonomi yang tidak kunjung ada jalan keluarnya.
- d) Diantara kelompok-kelompok agama ada yang menganggap bahwa kerukunan itu hanya semu, basa-basi saja.

e) Adanya dampak negatif dari globalisasi informasi dan ekonomi, yaitu perubahan yang sangat cepat, mengakibatkan kegelisahan bagi kelompok-kelompok agama yang belum siap untuk menerima perubahan yang terjadi. Hal ini dapat menimbulkan reaksi balik terhadap perubahan, sehingga kelompok-kelompok agama tersebut menjadi reaktif dan agresif, kemudian menimbulkan keberingasan-keberingasan dalam masyarakat.

7. Pluralisme : Antara Realitas, Kesadaran dan Sikap

Pluralitas masyarakat di manapun adalah sebuah realitas eksistensial yang terbentuk dari perbedaan yang ada secara kodrati dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Tak seorang manusia pun sama dengan manusia lainnya walau mereka lahir sebagai saudara kembar. Tak ada cap jempol yang sama adalah contoh paling nyata bahwa tidak ada dua orang manusia yang absolut sama. Mungkin saja sangat mirip tapi tidak mungkin persis sama.

Sebuah masyarakat terdiri dan berbentuk dari banyak orang yang merupakan bagian dari warga, kalau ada sebuah masyarakat tradisional yang dianggap homogen namun homogenitasnya itu relatif sifatnya sebab didalamnya pasti ada unsur-unsur yang berbeda sehingga tak akan terelakan adanya heterogenitas betapapun kecilnya.

Sebuah masyarakat dimanapun, bukanlah sebuah kumpulan makhluk organis yang statis, yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu tentu sangat bervariasi coraknya sehingga memperkaya dan menambah kompleksitas perbedaan. Karena itu tidak mungkin dihindari

bahwa pluralitas yang ada secara kodrati itu kemudian secara sosial dan kultural terus mengalami perkembangan dalam gerak sosial dan kultural terus mengalami perkembangan dalam gerak dinamika kehidupan manusia dan masyarakat yang multidimensional sifatnya, dan dengan sendirinya akan melahirkan berbagai visi tentang kehidupan dan masa depan.

Untuk batas tertentu pluralitas bisa dilihat sebagai kekayaan namun dalam perkembangannya ia tidak hanya berhenti pada sekedar perbedaan dan sebagai perbedaan semata tapi mungkin saja perbedaan itu bersifat diametral dan antagonistik sehingga sebenarnya bukan lagi perbedaan melainkan sebuah pertentangan. Tantangan yang dihadapi oleh manusia dan masyarakat adalah bukan menghilangkan perbedaan dan pertentangan sebagai realitas sosial dan kultural melainkan bagaimana mengelolanya secara kreatif sehingga mewujudkan dalam “*cooperation*” dan “*compertation*”, kerja sama dan persaingan. Dalam perspektif ini “*management of conflict*” menjadi sangat penting³⁵.

Pluralitas yang muncul dalam proses kehidupan bangsa kita mewujudkan dalam dua bentuk: pluralitas horizontal dan pluralitas vertikal. Yang pertama terlihat misalnya dalam perbedaan etnis atau ras dan agama sedangkan yang kedua terlihat umpamanya dalam perbedaan peran politik antara penguasa dan rakyat, dalam kemampuan ekonomi antara kaum terpelajar dan masyarakat awam. Tentu saja pluralitas vertikal ini tidak dikaitkan dengan pluralisme tradisional yang memberlakukan perbedaan strata sosial dalam pelambangan yang bersifat diskriminatif. Kedua-duanya,

³⁵ Djohan Efendi, *Pluralisme Realitas Sosial Dan Hubungan Antar Agama*”, dalam Mursyid Ali, *Pluralitas Sosial Dan Hubungan Antar Agama* (Bingkai Kultural Dan Teologi Kerukunan Hidup Beragama) (Jakarta : BPPA Depag, 1999-2000), hlm.13.

pluralitas horizontal dan pluralisme vertikal kita terima sebagai realitas sosial dan dalam kerangka pluralisme moderen yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Mobilitas sosial yang didukung oleh kemudahan dalam dan untuk bepergian sebagai hasil kemajuan sarana-sarana transportasi membuat kontak-kontak horizontal warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya makin sering terjadi dan juga makin luas jangkauannya melampaui batas-batas geografis, lokal, regional bahkan sering nasional sehingga heteroninitas masyarakat makin kompleks. Perbedaan tingkat dan kadar kemampuan warga masyarakat, baik dilihat dari segi kebendaan, kecerdasan maupun kesempatan untuk memperoleh jalur lembaga pendidikan maupun media massa, mengakibatkan perbedaan kemampuan untuk mengembangkan diri dan meraih keberhasilan.

Akibat lebih jauh adalah terjadinya pluralitas vertikal yang mengembangkan diri dan meraih keberhasilan. Akibat lebih jauh adalah terjadinya pluralitas vertikal yang terwujud dalam tingkatan strata sosial baik politik, ekonomi maupun keterpelajaran. Perlu disadari dan dicatat bahwa pluralitan walaupun dalam batas tertentu merupakan kekayaan yang membentuk mozaik kultural sekaligus potensi dinamik bangsa kita namun hal itu juga bisa menjadi sumber konflik sosial. Karena itu diperlukan usaha untuk menumbuhkan kesadaran untuk menerima perbedaan sebagai realitas natural maupun kultural sepanjang fungsional sifatnya dan tidak melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan. Dari perspektif ini kita bersinggungan dengan konsep pluralisme.

Pluralisme tentu saja lahir dari kesadaran dan kesediaan menerima perbedaan untuk kemudian mengolahnya sebagai unsur kreatif masyarakat kita sebagai sebuah kesatuan yang mengandung dan merangkum kemajemukan. Dalam perspektif masyarakat kita yang multietnik perlu disadari bahwa masing-masing etnik tentu memiliki identitas budayanya sendiri. Tambahan lagi, kehadiran berbagai agama yang menjadi anutan masyarakat kita telah memperkaya kemajemukan bangsa kita. Kehadiran agama-agama itu tentu saja memasuki aspek batiniah budaya bangsa kita. Karena itu pluralisme dengan sendirinya identik dengan dan memang pada hakikatnya merujuk atau sinonim multikulturisme.

Pluralisme lebih dari sekedar toleransi, dalam toleransi akan lahir sebuah kesadaran tentang pentingnya menghargai orang lain namun pluralisme ingin melampaui hal tersebut, yaitu sebagai upaya memahami orang lain melalui pemahaman yang konstruktif. Artinya karena keragaman dan perbedaan adalah hal yang nyata maka yang diperlukan adalah pemahaman yang baik dan lengkap tentang orang lain³⁶.

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai terpatrit dalam lambang negara kita Garuda Pancasila menegaskan bahwa bangsa kita secara tegas menganut prinsip pluralisme. Dengan pluralisme di sini tidak kita maksudkan pluralisme ekstrim sebagai reaksi terhadap monisme-monisme yang mengatakan bahwa dunia ini terjadi dari jumlah tak terbatas dari unsur-unsur terpisah.

³⁶ Zuhairi Misrawi, *Quran Kitab Toleransi*. (Jakarta Penerbit Fitrah, 2007). hlm. 207

Pluralisme yang perlu dan harus kita kembangkan adalah pluralisme yang terwujud dalam sikap pluralistik, yakni sikap yang bersedia menerima perbedaan, bukan hanya sebagai realitas objektif akan tetapi juga sebagai potensi dinamik yang memberikan kemungkinan-kemungkinan dan harapan akan kemajuan di masa depan. Sebuah pluralisme yang menyemangati sistem pergaulan sosial yang memungkinkan setiap unsur kultural masyarakat kita saling berinteraksi secara alamiah dalam proses yang saling memperkaya, dan diharapkan akan melahirkan sebuah masyarakat majemuk yang terbuka, multikultural dan demokratis.

Pluralitas dalam konteks kehidupan keagamaan tidak hanya ditandai oleh kehadiran berbagai agama yang secara eksistensial memiliki tradisi yang berbeda satu sama lain akan tetapi juga ditandai oleh pluralitas internal masing-masing agama, baik berkenaan dengan aspek penafsiran maupun aspek pelembagaannya. Kedua-duanya saling terjalin satu sama lain. Pluralitas penafsiran tidak hanya melahirkan berbagai aliran atau mazhab bahkan juga sekte keagamaan akan tetapi juga melahirkan perbedaan kecenderungan pandangan dan sikap: eksklusifisme dan inklusifisme. Pluralitas kelembagaan melalui itu agama mendunia, memasuki ruang dan waktu, tampak dari dan mewujudkan dalam kehadiran, paling tidak, tokoh-tokoh agama, organisasi-organisasi keagamaan dan komunitas-komunitas agama.

Perlu digarisbawahi bahwa pluralitas agama berkaitan dengan masalah yang sangat peka. Sebab agama berkaitan dengan keyakinan tentang sesuatu yang absolut benar, sesuatu yang ultimate, yang

menyangkut keselamatan hidup manusia setelah kematian. Keyakinan tersebut dijawantahkan dalam keberagamaan, tidak hanya dalam wujud keyakinan theologis atau simbolisme ritual melainkan juga dalam wujud kegiatan yang secara langsung atau tidak bernuansa bahkan berdampak sosial.

Masyarakat kita telah terpuruk dalam kehidupan yang diliputi oleh suasana saling curiga. Terhadap berbagai persepsi negatif satu sama lain dia antara berbagai kelompok masyarakat kita sehingga kehidupan kita sebangsa menyimpan potensi disintegrasi sosial. Masing-masing golongan merasa terancam eksistensi mereka oleh golongan lain. Berbagai kasus tragis telah menimbulkan trauma yang memerlukan waktu lama untuk dihilangkan dari memori. Selama itu benih-benih permusuhan akan tetap hidup di sudut hati masyarakat kita yang sewaktu-waktu menjelma menjadi konflik sosial³⁷.

8. Konsep Pemahaman Keagamaan Berwawasan Kebangsaan

Secara normatif doktriner agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih dan persaudaraan. Namun kenyataan sosiologis memperlihatkan sebaliknya. Agama dijadikan komoditas politik dan sumber konflik yang tak kunjung reda, baik internal maupun eksternal. Ketegangan yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia yang mengakibatkan hancurnya tempat ibadah seperti mushala, masjid, gereja dan korban jiwa selalu mengatasnamakan agama.

³⁷ Djohan Efendi, *Pluralisme Realitas Sosial Dan Hubungan Antar Agama*”, dalam Mursyid Ali, *Pluralitas Sosial Dan Hubungan Antar Agama* (Bingkai Kultural Dan Teologi Kerukunan Hidup Beragama) (Jakarta : BPPA Depag, 1999-2000), hlm.10-15.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap antara idealitas agama sebagai ajaran dan pesan suci Tuhan dan realitas empirik di masyarakat. Dengan begitu nilai suci agama menjadi kabur seiring dengan maraknya perilaku destruktif suatu masyarakat agama. Lalu dimanakah nilai suci agama itu ? Mengapa dengan mengatasnamakan agama, sesama manusia saling menghancurkan? Mengapa konflik sosial selalu mengatasnamakan agama agama? dan mengapa agama dijadikan penyebab konflik agama.

Sekurang-kurangnya menurut Bambang Sugiharto tantangan yang dihadapi oleh setiap agama saat ini ada tiga : (1) soal disintegrasi dan degradasi moral; (2) soal pluralisme dan eksklusivisme; (3) soal ketidakadilan. Ketiga persoalan tersebut sulit diatasi karena beberapa faktor. Diantaranya yaitu (1) sikap agresif yang berlebihan (2) konsep kemutlakan Tuhan yang salah dimengerti ; (3) kepentingan diluar agama (politik, ekonomi dan lain sebagainya) yang turut mengintervensi agama. Jika tantangan tersebut dapat diatasi maka persoalan kerukunan umat beragama dapat teratasi³⁸.

Sebab itu menurut Gus Dur dalam konteks hidup beragama dan pluralisme, pertama kali pemeluk agama harus membedakan antara berjenis-jenis “kesamaan” yang dimata agama dan negara terkait dengan kebenaran inti ajaran agama. Sedang kesamaan di mata negara adalah status masing-masing di muka hukum. Tak ada agama yang mau melepaskan “hak tunggalnya” untuk memonopoli kebenaran ajaran.

Menurut Komaruddin Hidayat, dalam hidup beragama, orientasi kemanusiaan perlu mendapat apresiasi. Hikmah hidup beragama,

³⁸ M. Zainuddin, “Meleraikan Konflik Atas Nama Agama”, *Koran Surya*. 30 Juli 2000. hlm.12.

menurutnya harus bermuara pada komitmen untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa dihambat oleh sentimen kelompok keagamaan. Karena itu Victor I Tanja mengajukan adanya reorientasi misi dan dakwah. Tujuan misi dan dakwah bukan untuk menambah kuantitas melainkan harus dilandaskan pada menciptakan umat yang tinggi ilmu, tinggi iman dan tinggi pengabdian (kualitas).

Quraish Shihab mengungkapkan salah satu kelemahan manusia adalah semangatnya yang menggebu-gebu. Sehingga diantara mereka yang bersikap melebihi Tuhan. Misalnya menginginkan manusia memiliki satu pendapat, satu aliran dan satu agama. Semangat yang menggebu-gebu inilah yang mengantarkan mereka memaksakan pandangan absolutnya untuk dianut orang lain.

Konflik yang terus menajam ditimbulkan oleh sikap eksklusif kelompok serta pada saat yang sama belum bisa mereduksi deversitas kedalam penyeragaman sesuai dengan keinginan kelompok itu sendiri³⁹. Memang konflik berwajah agama perlu dilihat dari berbagai faktor, sosial, ekonomi dan politik. Dan jika benar konflik itu murni agama, masalah kerukunan sejati tetap hanya dapat dibangun atas dasar keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia, yang menyentuh keluhuran martabat manusia. Makin mendalam rasa keagamaan seseorang, kian mendalam pula rasa keadilan dan kemanusiaannya.

Disinilah perlu keterbukaan antar umat beragama melalui dialog segar dan menyejukkan. Dialog yang meleburkan diri pada realitas dan

³⁹ Masykuri Abdillah, *Pluralisme dan Toleransi*, dalam buku *Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*, (Jakarta : Kompas, 2001), hlm. 12.

tatanan sosial yang tak adil, dengan sikap kritis. Karena setiap agama memiliki nilai kebaikan dan misi penegakan moralitas. Tidak cukup membangun dialog antaragama dengan dialog logika rasional. Perlu pula, logika psikis. Ikhtiar dialog logis teologi kerukunan, harus dibarengi dengan pencairan psikologis, seperti perasaan saling curiga yang selama ini selalu muncul.

Memang seperti yang diungkapkan oleh Kaustar Azhari kendala dialog antar umat beragama adalah persoalan eksklusivisme. Seorang eksklusivis akan terus berusaha agar orang lain mengikuti agamanya dengan menganggap agama orang lain keliru dan tidak selamat. Bahkan menurut Armahedi Azhar ada lima penyakit menghinggapi aktivis keagamaan yakni absolutisme, eksklusivisme, fanatisme, ekstrimisme dan agresivisme. Absolutisme adalah kesombongan intelektual, eksklusivisme adalah kesombongan sosial, fanatisme adalah kesombongan emosional, ekstrimisme adalah sikap berlebihan dan agresivisme adalah tindakan fisik berlebihan.

Dengan demikian sepanjang sikap diatas belum tercairkan, dialog menuju cita-cita agama luhur sulit tercapai. Sebetulnya kita tidak boleh terlalu khawatir pada dialog, sebab yang ingin dicapai dalam dialog bukan kompromi akidah melainkan akhlak keagamaan kita dapat disumbangkan untuk orang lain.

B. Kajian Teori

1. Intraksionalisme Simbolik George Herbert Mead

Dalam penelitian mengenai strategi komunikasi lintas agama yang dilakukan FKUB Kota Surabaya dalam menangani konflik, peneliti mengacu pada teori interaksionalisme simbolik yang erat kaitannya dengan analisa proses penyelesaian konflik melalui pendekatan komunikasi.

George Herbert Mead merupakan pelopor interaksionisme simbolik, meskipun dalam perintisan teori ini banyak ilmuwan lain yang ikut serta memberikan sumbangsuhnya, seperti James Mark Baldwin, William James, Charles H. Cooley, John Dewey dan William I. Thomas.

Mead mengembangkan teori interaksionisme simbolik pada tahun 1920-an ketika beliau menjadi profesor filsafat di Universitas Chicago. Namun gagasan-gagasannya mengenai interaksionisme simbolik berkembang pesat setelah para mahasiswanya menerbitkan catatan dan kuliah kuliahnya, terutama melalui buku yang menjadi rujukan utama teori interaksionisme simbolik, yakni *mind, self and society*.

Karya Mead yang paling terkenal ini menggarisbawahi tiga konsep kritis yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah diskusi tentang teori interaksionisme simbolik. Tiga konsep ini saling mempengaruhi satu sama lain dalam term interaksionisme simbolik. Dari itu, pikiran manusia (*mind*) dan interaksi sosial (*diri/self* dengan yang lain) digunakan untuk

menginterpretasikan dan memediasi masyarakat (*society*) di mana kita hidup.

Makna berasal dari interaksi dan tidak dari cara yang lain. Pada saat yang sama “pikiran” dan “diri” timbul dalam konteks sosial masyarakat. Pengaruh timbal balik antara masyarakat, pengalaman individu dan interaksi menjadi bahan bagi penelaahan dalam tradisi interaksionisme simbolik.⁴⁰

Interaksionalisme simbolik merupakan suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna⁴¹. Interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Bagi perspektif ini, individu bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan.

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka sendiri yang menentukan perilaku manusia.

⁴⁰ Ardianto, Elvinaro et al.. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), hlm. 136.

⁴¹ Mulyana, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 68.

Sebagaimana ditegaskan Blumer, dalam pandangan interaksionisme simbolik, proses sosial dalam kehidupan kelompok yang menciptakan dan menegakkan aturan-aturan, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial.⁴²

Menurut teoritis interaksionisme simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Secara ringkas, interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis berikut: pertama, individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik dan sosial berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial.

Teori ini berpandangan bahwa kenyataan sosial didasarkan kepada definisi dan penilaian subjektif individu. Struktur sosial merupakan definisi bersama yang dimiliki individu yang berhubungan dengan bentuk-bentuk yang cocok, yang menghubungkannya satu sama lain. Tindakan-

⁴² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 68-70.

tindakan individu dan juga pola interaksinya dibimbing oleh definisi bersama yang sedemikian itu dan dikonstruksikan melalui proses interaksi.

Interaksionisme simbolik didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat. Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes mengatakan bahwa ada tiga tema besar yang mendasari asumsi dalam teori interaksi simbolik⁴³:

a. Pentingnya makna bagi perilaku manusia

Teori interaksionisme simbolik berpegang pada perilaku individu dalam membentuk makna melalui proses komunikasi karena makna tidak bersifat intrinsik terhadap apapun. Dibutuhkan konstruksi interpretif diantara orang-orang yang menciptakan makna. Bahkan tujuan dari interaksi menurut teori interaksionisme simbolik adalah untuk menciptakan makna yang sama. Hal ini penting karena tanpa makna yang sama komunikasi akan terjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. Dalam karya Herbert Blumer dijelaskan ada tiga asumsi mendasar teori interaksionisme simbolik yakni :

- 1) Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain terhadap mereka.

Asumsi ini menjelaskan perilaku sebagai suatu rangkaian pemikiran dan perilaku yang dilakukan secara sadar antara rangsangan dan respon orang berkaitan dengan rangsangan tersebut. Bahkan lebih jauh lagi teori ini mempelajari makna

⁴³ West, Richard & Lynn H. T. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Buku 1 Edisi ke-3 Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer. (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 98-104.

dibalik perilaku, baik secara psikologis maupun sosiologis. Makna yang kita berikan pada simbol merupakan produk interaksi sosial dan menggambarkan kesepakatan kita untuk menerapkan makna tertentu pada simbol tertentu pula.

2) Makna yang diciptakan dalam interaksi antar manusia.

Mead menekankan dasar intersubjektif dari makna sebuah benda. Makna dapat ada hanya ketika orang-orang memiliki interpretasi yang sama mengenai simbol yang mereka tukarkan dalam interaksi. Blumer menjelaskan ada tiga cara untuk menjelaskan sebuah makna. Pertama, makna adalah suatu yang bersifat intrinsik dari suatu benda. Misalnya sebuah bangku jelas-jelas merupakan bangku dalam dirinya, maknanya memancar dapat dikatakan demikian dari benda tersebut sesuai dengan fungsinya. Yang penting adalah untuk mengenali makna yang sudah ada dalam benda tersebut.

Kedua, asal-usul makna terlihat dari siapa yang membawa benda tersebut dan bagi siapa benda tersebut memiliki makna. Hal ini memperkuat asumsi bahwa makna ada dalam diri orang, bukan didalam benda. Dalam sudut pandang ini makna dijelaskan dengan mengisolasi elemen-elemen psikologis di dalam seorang individu yang menghasilkan makna.

Ketiga, dikatakan bahwa melihat makna sebagai sesuatu yang terjadi di antara orang-orang. Makna adalah produk sosial atau ciptaan yang dibentuk dalam dan melalui pendefinisian aktivitas manusia ketika mereka berinteraksi.

3) Makna dimodifikasi melalui proses interpretatif.

Blumer menyatakan bahwa proses interpretatif memiliki dua langkah. Pertama, para pelaku menentukan benda-benda yang mempunyai makna. Blumer berargumen bahwa bagian dari proses ini berbeda dengan pendekatan psikologis dan terdiri atas orang-orang yang terlibat di dalam komunikasi dengan dirinya sendiri. Kedua, melibatkan pelaku untuk memilih, mengecek dan melakukan transformasi makna didalam konteks dimana mereka berada. Disesuaikan dengan budaya, karakter dan waktu dimana komunikasi itu dilakukan.

b. Pentingnya konsep mengenai diri

Tema kedua pada interaksionisme simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri (*self concept*) atau seperangkat persepsi yang relatif stabil yang dipercaya orang mengenai dirinya. Karakteristik tentang ciri fisiknya, peranan, talenta, keadaan emosi, nilai, keterampilan dan keterbatasan sosial, intelektualitas dan seterusnya membentuk konsep dirinya. Selanjutnya interaksionisme simbolik tertarik pada cara orang mengembangkan konsep diri. interaksionisme simbolik menggambarkan individu dengan diri yang aktif, didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya.

- 1) Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain.

Asumsi ini menyatakan bahwa kita membangun perasaan akan diri (*sense of self*) tidak selamanya melalui kontak dengan orang lain. Orang-orang tidak lahir dengan konsep diri, mereka belajar tentang dirinya melalui interaksi. Menurut interaksi simbolik bayi tidak memiliki perasaan mengenai dirinya sendiri sebagai individu. Selama tahun pertama kehidupannya, anak-anak mulai untuk membedakan dirinya dengan alam sekitarnya. Ini merupakan perkembangan paling awal dari konsep diri.

Interaksionisme simbolik terus berlanjut melalui proses anak mempelajari bahasa dan kemampuan untuk memberikan respon kepada orang lain serta menginternalisasi umpan balik yang ia terima. Peneliti-peneliti sepakat bahwa keluarga memiliki peranan penting sebagai institusi untuk bersosialisasi.

- 2) Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku.

Pemikiran bahwa keyakinan, nilai, perasaan, penilaian-penilaian, mengenai diri mempengaruhi perilaku adalah sebuah prinsip penting dalam teori interaksionalisme simbolik. Herbert Mead berpendapat bahwa karena manusia memiliki diri, mereka memilih mekanisme untuk interaksi dengan

dirinya sendiri. Mekanisme ini digunakan untuk menuntun perilaku dan sikap. Penting juga diingat bahwa Mead melihat diri sebagai sebuah proses bukan struktur. Memiliki struktur memaksa orang untuk mengonstruksi tindakan dan responnya daripada sekedar mengekspresikannya.

Misalnya jika anda merasa yakin akan kemampuan anda dalam melakukan sesuatu, maka akan sangat mungkin bahwa anda akan berhasil dengan baik dalam melakukan hal tersebut. Bahkan akan sangat mungkin pula bahwa anda akan merasakan percaya diri dalam melakukan hal lainnya. Proses ini sering kali dikatakan sebagai prediksi pemenuhan diri (*self fulfilling prophecy*) atau pengharapan akan diri yang menyebabkan seseorang berperilaku sedemikian rupa sehingga harapannya terwujud.

c. Hubungan antara individu dan masyarakat

Tema yang terakhir berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan batasan sosial. Mead dan Blumer mengambil posisi tengah untuk pertanyaan ini. Mereka mencoba menjelaskan baik mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial.

Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah :

- 1) Orang dan kelompok- kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial.

Asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku individu. Sebagai contoh seseorang

yang bekerja pada hari pertamanya di tempat yang baru, ia akan lebih memilih menggunakan pakaian yang sesuai dengan norma dan budaya dimana ia bekerja, walaupun sebetulnya ia tidak menyukainya.

Selain itu, budaya dengan sangat kuat mempengaruhi individu dan sikap yang kita anggap penting dalam konsep diri. Di Amerika Serikat, orang yang melihat diri mereka sebagai orang yang asertif (tegas) adalah orang yang seringkali bangga pada atribut ini dan merefleksikannya dengan baik pada diri mereka. Dapat terjadi demikian karena Amerika Serikat adalah sebuah budaya yang individualistis yang menghargai ketegasan dan individualitas. Pada banyak budaya Asia kerjasama dan komunitas dihargai dengan sangat tinggi dan kolektivitasnya lebih penting daripada individual. Jadi, orang Asia yang melihat dirinya sebagai orang yang asertif mungkin akan merasa malu dengan konsep diri semacam ini.

2) Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.

Asumsi ini mempertegas bahwa dalam situasi tertentu individu dalam interaksinya dapat memodifikasi struktur dan tidak secara penuh dibatasi oleh hal tersebut. Dengan kata lain menurut interaksionalisme simbolik manusia juga menjadi pembuat pilihan.